Penerapan Konsep Hak dan Kewajiban Peserta BPJS dalam Memperoleh Jaminan Kesehatan

Putri Devita Sari

IIK STRADA INDONESIA

novitrimaharani57@gmail.com

Abstrak

Hak merupakan segala sesuatu yang telah melekat pada diri manusia, yang sudah dimiliki dari sejak manusia itu lahir ke dunia dan bersifat mutlak atau tidak dapat diganggu gugat oleh pihak lain, serta tidak dapat dipisahkan dari hakikatnya sehingga sifatnya tetap suci. Kewajiban merupakan segala sesuatu yang harus dilakukan dengan penuh tanggung jawab, dan apabila tidak dikerjakan pasti ada sanksi yang akan diberikan sebagai bentuk penegasan bahwasannya itu adalah hal yang wajib untuk dilakukan. BPJS Kesehatan (Badan Penyelenggara Jaminan Sosial) Kesehatan merupakan badan hukum publik yang bertanggung jawab langsung kepada Presiden dan memiliki tugas untuk menyelenggarakan jaminan kesehatan nasional bagi seluruh rakyat Indonesia. Dalam program ini, peserta BPJS Kesehatan tidak lain adalah semua penduduk Indonesia, wajib hukumnya menjadi peserta jaminan kesehatan yang dikelola oleh BPJS termasuk orang asing yang telah bekerja paling singkat enam bulan di Indonesia dan telah membayar iuran. Kepesertaan BPJS Kesehatan bersifat wajib. Meskipun yang bersangkutan sudah memiliki Jaminan Kesehatan lain.

Kata kunci : Hak, Kewajiban, BPJS

1. Latar Belakang

Hak merupakan segala sesuatu yang telah melekat pada diri manusia, yang sudah dimiliki dari sejak manusia itu lahir ke dunia dan bersifat mutlak atau tidak dapat diganggu gugat oleh pihak lain, serta tidak dapat dipisahkan dari hakikatnya sehingga sifatnya tetap suci. Kewajiban merupakan segala sesuatu yang harus dilakukan dengan penuh tanggung jawab, dan apabila tidak dikerjakan pasti ada sanksi yang akan diberikan sebagai bentuk penegasan bahwasannya itu adalah hal yang wajib untuk dilakukan. Dalam hal ini peserta BPJS akan menerima apa yang telah menjadi haknya yaitu memperoleh pelayanan kesehatan dari pihak institusi kesehatan. Akan tetapi dibalik semua itu juga ada tanggung jawab yang harus dipenuhi oleh setiap peserta BPJS diantaranya ialah membayar iuran secara rutin setiap bulan sebelum tanggal 10.

Program BPJS Kesehatan bersama dengan BPJS ketenagakerjaan (dahulu bernama jamsostek) merupakan program pemerintah dalam kesatuan Jaminan Kesehatan Nasional (JKN) yang diresmikan pada tanggal 31 Desember 2013. Untuk BPJS Kesehatan sendiri mulai beroperasi sejak tanggal 1 Januari 2014, sedangkan untuk BPJS ketenagakerjaan mulai beroperasi sejak 1 Juli 2015.

Kepesertaan BPJS yang bersifat wajib ini mengharuskan setiap warga negara maupun warga negara asing yang sudah bekerja di Indonesia selama kurang lebih enam bulan wajib menjadi anggota BPJS. Setiap perusahaan wajib mendaftarkan pekerjanya sebagai anggota BPJS. Selanjutnya mengenai iuran, setiap anggota dari BPJS akan dimintai iuran yang besarnya akan ditentukan kemudian. Sedangkan untuk warga miskin, iuran BPJS akan ditanggung pemerintah melalui program bantuan iuran.

Jaminan Kesehatan secara universal diharapkan mampu memberikan manfaat bagi seluruh rakyat Indonesia terutama dan warga negara asing yang sudah bekerja di Indonesia selama kurang lebih enam bulan pada umumnya, yang harapannya bisa dimulai secara bertahap dari tahun 2014. Menteri Kesehatan Nafsiah Mboi menyatakan BPJS Kesehatan akan diupayakan untuk menanggung segala jenis penyakit namun, dengan melakukan upaya efisiensi.

2. Kasus/Masalah

1. Apa saja yang menjadi hak dan kewajiban peserta BPJS ?
2. Mengapa kepesertaan BPJS bersifat wajib ? Terutama bagi perusahaan yang mempekerjakan manusia sebagai pelaksana utama perusahaan tersebut.
3. Apakah ada ketentuan dalam membayar iuran BPJS ? Kemudian bagaimana dengan masyarakat miskin yang tidak mampu membayar iuran tersebut ?
4. Mengapa kita harus ikut berpartisipasi dalam program pemerintah yaitu BPJS ?
5. Harapan apa yang ingin dicapai oleh Jaminan Kesehatan yang sifatnya universal ?

3. Tinjauan Pustaka

Hidup sehat merupakan kebutuhan dasar bagi setiap orang, agar dapat menjalani kehidupan sehari-hari dengan baik. Orang akan selalu berusaha untuk menjaga kesehatannya dan berharap tidak sakit, akan tetapi suatu keniscayaan bahwa setiap manusia akan mengalami sakit dan tentunya memerlukan pengobatan agar cepat sembuh. Oleh karena kesehatan ini bersifat melekat erat pada setiap manusia, maka kesehatan menjadi salah satu aspek penting dalam hak asasi manusia, hal ini bisa kita lihat dalam Deklarasi Hak Asasi Manusia Perserikatan Bangsa-Bangsa (PBB) tertanggal 10

November 1948 yang menyatakan bahwa, setiap orang berhak atas taraf kehidupan yang memadai untuk kesehatan dan kesejahteraan dirinya sendiri dan keluarganya.

Penduduk Indonesia yang diperkirakan hampir 250 juta jiwa dengan wilayah yang cukup luas membutuhkan perhatian khusus pemerintah dalam memberikan pelayanan kesehatan. Upaya pemenuhan hak kesehatan baik yang dilakukan oleh pemerintah pusat dan pemerintah daerah belum sepenuhnya mampu melindungi seluruh lapisan masyarakat, karena upaya tersebut masih bersifat parsial yang hanya ditujukan untuk masyarakat pada daerah tertentu (Program Jaminan Kesehatan Daerah) atau kalangan kelompok masyarakat yang mampu membayar asuransi kesehatan seperti PNS, TNI POLRI, sehingga masih banyak masyarakat miskin yang belum mendapatkan hak pemenuhan kesehatan yang disebabkan mahal biaya berobat dan fasilitas pelayanan kesehatan yang belum maksimal.

Berkaitan dengan kepentingan bangsa bahwa kesehatan merupakan bagian dari tujuan pembangunan nasional, dasar-dasar ini diperoleh dari amanah Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, (selanjutnya disebut UUD NRI 1945), yang dimaksudkan didalam Pasal 28H UUD NRI 1945 disebutkan bahwa "penyelenggara

upaya kesehatan diatur oleh pemerintah, sehingga perlu adanya jaminan terhadap kesehatan masyarakat, hal itu dilaksanakan pemerintah dengan melaksanakan Sistem Jaminan Kesehatan Nasional (SJKN), pemerintah didalam melaksanakan jaminan kesehatan membentuk aturan yang berbentuk Peraturan Presiden Republik Indonesia.

Keberadaan Perpres 12/2013 dan Perpres 111/2013 ini mempertimbangkan keberadaan Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 40 Tahun 2004 tentang Sistem Jaminan Sosial Nasional (selanjutnya disebut UU 40/2004 dan Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 24 Tahun 2011 tentang Badan Penyelenggaraan Jaminan Sosial, yang selanjutnya disebut UU 24/2011).

Wujud komitmen Negara dalam pemenuhan kesehatan dilakukan melalui program jaminan sosial kesehatan masyarakat. Jaminan sosial kesehatan masyarakat merupakan amanat undang-undang dasar 1945 dalam pasal 34 ayat (2) "Negara mengembangkan sistem jaminan sosial bagi seluruh rakyat dan memberdayakan masyarakat yang lemah dan tidak mampu sesuai dengan martabat kemanusiaan" dan ayat (3) "Negara bertanggung jawab atas penyediaan fasilitas pelayanan kesehatan dan fasilitas pelayanan umum yang layak". Atas dasar itu pemerintah dan DPR sepakat membuat undang-undang nomor 40 tahun 2004 tentang Sistem Jaminan Sosial Nasional, yang bertujuan memberi kepastian perlindungan dan kesejahteraan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia. Melalui program ini, setiap penduduk diharapkan dapat memenuhi kebutuhan dasar hidup yang layak apabila terjadi hal-hal yang dapat mengakibatkan hilang atau berkurangnya pendapatan, karena menderita sakit, mengalami kecelakaan, kehilangan pekerjaan, memasuki usia lanjut, maupun pensiun.

Perwujudan pencapaian tujuan negara atas kesejahteraan tercermin dalam grafik pertumbuhan ekonomi. Pertumbuhan ekonomi Indonesia sampai dengan triwulan IV Tahun 2018 menunjukkan angka 5,18 persen. Menurut kepala BPS Suhariyanto, angka pertumbuhan ekonomi ini sudah cukup baik di tengah kondisi perekonomian global yang tidak menentu. Bagi negara-negara maju maupun negara yang sedang berkembang seperti halnya Indonesia, tumbuh kesadaran betapa pentingnya peranan kewirausahaan dalam pembangunan nasional. Hal ini bisa terlihat dari besarnya peranan Usaha Mikro, Kecil, Menengah (UMKM) terutama kemampuannya dalam menyerap tenaga kerja serta sifatnya yang fleksibel terhadap perekonomian. Salah satu UMKM yang berkembang di Yogyakarta adalah coffee shop.

Pengusaha coffee shop mempekerjakan pekerja dengan jangka waktu tertentu dan dibuat dalam perjanjian kerja. Perjanjian kerja yang dibuat antara pengusaha coffee shop dengan pekerjanya menunjukkan adanya hubungan hukum antara pengusaha dengan pekerja. Pengusaha merupakan pemberi kerja sebagaimana diatur dalam Pasal 1 angka 5 Undang – Undang Nomor 13 Tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan. Diatur bahwa pengusaha dapat perseorangan, persekutuan, maupun badan usaha baik itu berbadan hukum maupun tidak berbadan hukum. Usaha coffee shop biasanya dijalankan oleh orang perseorangan atau persekutuan orang yang kemudian membentuk badan usaha. Pekerja coffee shop dipekerjakan berdasarkan perjanjian kerja yang telah dibuat berdasarkan kesepakatan antara pengusaha dan pekerja.

Hubungan kerja yang terjadi mengakibatkan adanya hak dan kewajiban yang ditimbulkan bagi pekerja coffee shop. Salah satu hak pekerja coffee shop sebagai imbalan yang diterima atas pekerjaan yang dilakukan adalah hak untuk menerima upah. Pasal 1 angka 30 Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan, diatur bahwa "upah adalah hak pekerja atau buruh yang diterima dan dinyatakan dalam bentuk uang sebagai imbalan dari pengusaha atau pemberi kerja kepada pekerja atau buruh yang ditetapkan dan dibayarkan menurut suatu perjanjian kerja, kesepakatan, atau peraturan perundang-undangan, termasuk tunjangan bagi pekerja atau buruh dan keluarganya atas suatu pekerjaan dan/atau jasa yang telah atau akan dilakukan". Pemberian hak atas pekerja yang didasarkan dari adanya hubungan kerja selain hak untuk mendapatkan upah terdapat juga hak untuk mendapatkan jaminan sosial. Berkaitan dengan hak pekerja atas jaminan sosial maka Pasal 99 ayat (1) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 13 Tahun 2003 tentang ketenagakerjaan menyatakan bahwa setiap pekerja atau buruh dan keluarga berhak untuk memperoleh jaminan sosial tenaga kerja.

Bentuk pemenuhan hak atas jaminan sosial terhadap pekerja ini diselenggarakan oleh Badan Penyelenggara Jaminan Sosial yang diatur secara spesifik dalam Pasal 5 ayat (2) Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2011 tentang Badan Penyelenggaraan Jaminan Sosial diatur bahwa jaminan sosial akan diselenggarakan oleh Badan Penyelenggaraan Jaminan Sosial (BPJS) yang terdiri atas BPJS Kesehatan dan BPJS Ketenagakerjaan. BPJS Kesehatan merupakan transformasi dari PT Askes (PERSERO) yang bertugas untuk memberikan perlindungan kesehatan secara mendasar bagi seluruh rakyat Indonesia. BPJS Ketenagakerjaan berbeda dengan BPJS Kesehatan yang mana BPJS Ketenagakerjaan merupakan transformasi dari PT Jamsostek (PERSERO) serta mempunyai tugas yang berbeda juga dengan BPJS Kesehatan yaitu bertugas memberikan perlindungan terhadap tenaga kerja Indonesia. Peraturan teknis atas pelaksanaan BPJS diatur dengan Peraturan Pemerintah. Pasal 2 ayat (3) Peraturan Pemerintah Nomor 84 Tahun 2013 Perubahan Kesembilan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 14 Tahun 1993 tentang Penyelenggaraan Program Jaminan Sosial Tenaga Kerja diatur bahwa “pengusaha yang mempekerjakan tenaga kerja sebanyak 10 (sepuluh) orang atau lebih, atau membayar upah paling sedikit Rp.1.000.000 (satu juta rupiah) sebulan mempunyai kewajiban untuk mendaftarkan tenaga kerjanya dalam program jaminan sosial tenaga kerja”.

4. Pembahasan

Kesehatan merupakan faktor utama bagi setiap manusia untuk menjaga keberlangsungan kehidupan didunia, kesehatan sangat besar manfaatnya bagi setiap orang, kegiatan yang meliputi faktor situasional dapat tercapai dengan baik apabila

didalam prosesnya kesehatan dapat terus terjaga. Faktor situasional adalah mencakup faktor lingkungan dimana manusia berada atau bertempat tinggal, baik lingkungan fisik, sosial, budaya, ekonomi, politik, dan sebagainya.

Sebaliknya, apabila didalam proses kegiatan faktor situasional seseorang tidak mampu menjaga kesehatannya, maka yang terjadi tujuan dalam proses kegiatan tersebut akan tertunda bahkan akan mengalami kegagalan, “kesehatan merupakan isu krusial yang harus dihadapi setiap negara karena berkorelasi langsung dengan pengembangan integritas pribadi setiap individu supaya dapat hidup bermartabat”.

1. Dalam hal ini peserta BPJS akan menerima apa yang telah menjadi haknya yaitu memperoleh pelayanan kesehatan dari pihak institusi kesehatan secara adil tanpa membedakan ras, suku, agama, budaya, dsb. Akan tetapi dibalik semua itu juga ada tanggung jawab yang harus dipenuhi oleh setiap peserta BPJS diantaranya ialah membayar iuran secara rutin setiap bulan, sebagai bukti bahwa adanya tanggung jawab yang diberikan oleh setiap peserta BPJS terhadap hak yang telah diperoleh. Berikut ada beberapa hak dan kewajiban setiap peserta BPJS, diantaranya :

Hak :

- 1) Menentukan FKTP (Fasilitas Kesehatan Tingkat Pertama) yang diinginkan pada saat mendaftar.
- 2) Memperoleh informasi tentang hak dan kewajiban serta prosedur pelayanan kesehatan sesuai dengan ketentuan yang berlaku.
- 3) Mendapatkan kartu identitas peserta sebagai identitas peserta JKN-KIS untuk memperoleh pelayanan kesehatan.
- 4) Mendapatkan manfaat pelayanan kesehatan di fasilitas kesehatan yang bekerja sama dengan BPJS Kesehatan.
- 5) Menyampaikan pengaduan, kritik dan saran baik secara lisan maupun tertulis kepada BPJS Kesehatan.

Kewajiban :

- 1) Mendaftarkan diri dan anggota keluarganya sebagai peserta JKN-KIS kepada BPJS Kesehatan.
 - 2) Membayar iuran secara rutin setiap bulan sebelum tanggal 10 (sepuluh).
 - 3) Memberikan data dirinya dan anggota keluarganya secara lengkap dan benar.
 - 4) Melaporkan perubahan data dirinya dan anggota keluarganya, antara lain perubahan golongan, pangkat atau besaran gaji, pernikahan, perceraian, kematian, kelahiran, pindah alamat/ domisili dan pindah fasilitas kesehatan tingkat pertama serta perubahan alamat email dan nomor handphone.
 - 5) Menjaga kartu peserta agar tidak rusak, hilang atau dimanfaatkan oleh orang yang tidak berhak.
 - 6) Mentaati prosedur dan ketentuan untuk memperoleh manfaat pelayanan kesehatan yang telah ditetapkan.
2. Kesehatan dan keselamatan merupakan faktor utama bagi setiap manusia untuk menjaga keberlangsungan kehidupan didunia, kesehatan sangat besar manfaatnya bagi setiap orang, kegiatan yang meliputi faktor situasional dapat tercapai dengan baik apabila didalam prosesnya kesehatan dapat terus terjaga, dan tentunya untuk keselamatan pun juga menjadi faktor penting dalam kehidupan manusia karena keselamatan merupakan anugerah yang didambakan setiap makhluk yang berasaldari sang pencipta agar dapat lebih berhati-hati dalam setiap melakukan suatu pekerjaan.
3. Selain mendapatkan hak, peserta BPJS juga berkewajiban untuk membayarkan sebuah iuran yang telah disepakati sebelumnya dan iuran tersebut harus dibayarkan setiap

bulan sebelum tanggal 10. Kemudian untuk masyarakat yang kurang mampu iuran akan ditanggung oleh pemerintah melalui Program Bantuan Iuran (PBI).

4. BPJS merupakan program dari pemerintah yang diselenggarakan oleh badan kesehatan nasional dengan tujuan tercapainya taraf kesehatan warga negara secara maksimal. Oleh karena itu selain bersifat wajib dan harus, itu dapat mempermudah kita dalam memperoleh jaminan kesehatan. Karena sehat merupakan kebutuhan dasar bagi setiap orang, agar dapat menjalani kehidupan sehari-hari dengan baik. Orang akan selalu berusaha untuk menjaga kesehatannya dan berharap tidak sakit, akan tetapi suatu keniscayaan bahwa setiap manusia akan mengalami sakit dan tentunya memerlukan pengobatan agar cepat sembuh. Oleh karena kesehatan ini bersifat melekat erat pada setiap manusia, maka kesehatan menjadi salah satu aspek penting dalam hak asasi manusia, hal ini bisa kita lihat dalam Deklarasi Hak Asasi Manusia Perserikatan Bangsa-Bangsa (PBB) tertanggal 10 November 1948 yang menyatakan bahwa, setiap orang berhak atas taraf kehidupan yang memadai untuk kesehatan dan kesejahteraan dirinya sendiri dan keluarganya.
5. Jaminan Kesehatan secara universal diharapkan mampu memberikan manfaat bagi seluruh rakyat Indonesia terutama dan warga negara asing yang sudah bekerja di Indonesia selama kurang lebih enam bulan pada umumnya, yang harapannya bisa dimulai secara bertahap dari tahun 2014. Menteri Kesehatan Nafsiah Mboi menyatakan BPJS Kesehatan akan diupayakan untuk menanggung segala jenis penyakit namun, dengan melakukan upaya efisiensi.

Kesimpulan

Kesehatan merupakan hal yang mendasar, setiap manusia memiliki hak untuk menjaga kesehatannya sendiri demi keberlangsungan hidup dan demi tercapainya tujuan setiap individu tersebut. Setiap manusia berhak mendapatkan layanan kesehatan yang memadai, namun dibalik semua itu juga terdapat kewajiban yang harus dibayar untuk mendapat layanan kesehatan tersebut. Badan Penyelenggara Jaminan Sosial Kesehatan merupakan bagian penting dari negara sebagai upaya untuk meningkatkan kualitas kesehatan masyarakat secara nasional. Oleh karena itu, dalam pelaksanaan program BPJS ini harus dapat memaksimalkan kinerjanya karena para peserta BPJS juga dituntut untuk membayar iuran setiap bulannya. Jadi, dalam hal ini hak peserta BPJS adalah mendapat jaminan kesehatan dari program pemerintah tersebut, dan kewajibannya adalah membayar iuran setiap bulan sebelum tanggal sepuluh dan bagi seseorang yang memiliki perusahaan wajib baginya untuk mendaftarkan karyawannya demi kesehatan dan keselamatan bersama.

Daftar Pustaka

Sodik, M. A., Suprpto, S. I., & Pangesti, D. (2013). *Faktor-Faktor Yang Berhubungan Dengan Pelaksanaan Pelayanan Prima Pegawai Di Rsui Orpeha Tulungagung*. STRADA Jurnal Ilmiah Kesehatan, 2(1), 24-32.

Siyoto, S., & Sodik, M. A. (2015). *Dasar metodologi penelitian*. Literasi Media Publishing.

Oktoriani, E. N., Sutrisno, J., Mayasari, E., & Sodik, M. A. (2018). *Analysis of medical record complete flexibility to complete claims of health BPJS RS Baptis Kota Batu*. Journal of Global Research in Public Health, 3(1), 46-53.

Sodik, M. A. (2016). *Leprosy Patients in public perception: A qualitative study of patient confidence (dis) in the Community*. J Global Res Public Health, 1(2), 99-106.

Attoriq, S., & Sodik, M. A. (2018). *Pencegahan Dan Pengendalian Infeksi Terkait Pelayanan Kesehatan Di Lahan Praktik*.

Tule, A. R., Siyoto, S., Dwianggamawati, M. S., & Sodik, M. A. (2018). *The Analysis Factors Affecting Interest In Medication Of Receipt Help Aid Bpjs Participant In Balowerti Public Health Center Kediri City*. Journal of Global Research in Public Health, 3(1), 68-75.

Sodik, M. A., & Nzilibili, S. M. M. (2017). *The Role Of Health Promotion And Family Support With Attitude Of Couples Childbearing Age In Following Family Planning Program In Health*. Journal of Global Research in Public Health, 2(2), 82-89.

Riyani, A., & Hidajaturrokhmah, N. Y. (2019). *Effektivness Health Education Using Audio Visual With Lectures And Poster With Lectures Of Changes In Behavior Selection Of Snacks In Tulungagung Elementary School*. Journal of Global Research in Public Health, 4(2), 145-152.

Sodik, M. A. (2018, September). *Analysis of Improved Attitude of Youth in HIV/AIDS Prevention through the Provision of Health Education with Peer Education*. In The 2nd Joint International Conferences (Vol. 2, No. 2, pp. 495-502).

Sodik, M. A., Yudhana, A., & Dwianggamawati, M. S. (2018). *Nutritional status and anemia in islamic boarding school adolescent in Kediri City East Java Indonesia*. Indonesian Journal of Nutritional Epidemiology and Reproductive, 1(3), 172-176.

Labib, Ahmad, 2017, *Pemenuhan Hak Konstitusional Warga Negara Indonesia : Studi Kasus Jaminan Kesehatan Nasional*, Justitia Jurnal Hukum Vol. 1 No. 1, ISSN 2579-9983, Surabaya.

Firdaus, Insan, 2014, *Pemenuhan Hak atas Kesehatan Melalui Badan Penyelenggaraan Jaminan Sosial Kesehatan di Indonesia*, Jurnal Hak Asasi Manusia Vol. 5 No. 2, ISSN 117-128, Kuningan, Jakarta Selatan.

Panggabean, Martin, Rizky, 2019, *Pemenuhan Hak atas BPJS Ketenagakerjaan Bagi Pekerja Lagani Coffee & CO Di Yogyakarta*, Jurnal Universitas Atma Jaya Yogyakarta, Yogyakarta.

https://id.m.wikipedia.org/wiki/BPJS_Kesehatan

<https://gajimu.com/pekerjaan-yanglayak/jaminan-sosial/bpjs-kesehatan/bpjs-kesehatan>

<https://www.ejournalwirajaya.com/index.php/JIK/article/view/708/732>

<https://krakataumedika.com/info-media/artikel/apa-hak-dan-kewajiban-peserta-bpjs-kesehatan>

<https://www.jamkesnews.com/jamkesnews/Faqs/detail/86/20201013/apa-hak-dan-kewajiban-peserta-jkn-kis>

<https://bpjs-kesehatan.go.id/bpjs/index.php/pages/detail/2017/27>